

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG HIJAU DI KAMPUNG ANGGREK DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Sri Maslihah<sup>1</sup>, Helli Ihsan<sup>2</sup>, Ismawati Kosasih<sup>3</sup>

Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

E-Mail : <sup>1</sup>[maslihah\\_psi@upi.edu](mailto:maslihah_psi@upi.edu), <sup>2</sup>[helli\\_psi@upi.edu](mailto:helli_psi@upi.edu),

<sup>3</sup>[ismawati.kosasih@upi.edu](mailto:ismawati.kosasih@upi.edu)

### **Abstract**

*Kampung Anggrek is one of the villages in Cikole, Lembang West Bandung Regency which has promising potential natural resource. The problem in this village is the behavior of the community in disposing of waste. Referring to these problems, it is necessary to shape people's behavior in managing waste. Community service activities are carried out by taking the theme of developing a green village which aims to shape community behavior, especially in managing waste so as to make the environment clean and healthy through community empowerment programs. Service activities were carried out to the green village core team consisting of 20 RW administrators who were the core team of the green village. Each participant of the core team will be a companion for community members in implementing the green village program. The result of this study is the existence of public awareness to carry out waste management which is followed by the movement to green the village. One of the green village programs is planting through the media of used plastic waste. The conclusion of the study of this service program is that through community empowerment there is a process of awareness as a manifestation of changes in thinking that underlie changes in behavior.*

**Keyword** : community empowerment, green village, TFT, behavior change

### **Abstrak**

Kampung Anggrek merupakan salah satu kampung di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Permasalahan pada kampung ini adalah perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Mengacu permasalahan tersebut membentuk perilaku masyarakat dalam mengelola sampah menjadi keniscayaan. Untuk itu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan mengambil tema pengembangan Kampung Hijau yang bertujuan membentuk perilaku masyarakat khususnya dalam mengelola sampah sehingga menjadikan lingkungan bersih dan sehat melalui program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan kepada tim inti kampung hijau yang terdiri dari 20 orang pengurus RW. Setiap partisipan akan menjadi pendamping bagi warga masyarakat dalam pelaksanaan program kampung hijau. Hasil dari program ini adalah adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang dilanjutkan gerakan menghijaukan kampung melalui program penanaman tanaman salah satunya melalui media sampah plastik bekas. Simpulan kajian program pengabdian ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat terjadi proses penyadaran sebagai manifestasi perubahan berpikir yang mendasari terjadinya perubahan perilaku.

**Kata Kunci**: pemberdayaan masyarakat, kampung hijau, TFT, perubahan perilaku

## **1. Pendahuluan**

Kampung Anggrek Desa Cikole adalah salah satu kampung di desa Cikole kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang berada diantara tempat wisata alam dan merupakan daerah pertanian juga. Saat ini wilayah Cikole di Kabupaten Bandung Barat ini telah bertransformasi sebagai sebuah kawasan wisata alam terpadu yang selalu ramai oleh wisatawan. Suasana alam yang sangat asri bebas polusi dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan menjadi alasan utama para pelaku usaha wisata menjadikan Cikole sebagai daerah wisata alam. Oleh karenanya menjadi pedagang di area wisata menjadi salah satu pekerjaan yang banyak dipilih masyarakat termasuk warga kampung Anggrek lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat wisata. Bahkan di area Kampung Anggrek terdapat beberapa hotel dan villa yang disewakan untuk para turis domestic maupun asing. Dari letak geografis kampung ini merupakan kampung yang dilalui para wisatawan khususnya ke lokasi wisata seputar Lembang.

Permasalahan yang ada di kampung ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sehingga antara sampah organik dan sampah non organik masih bercampur. Volume sampah yang cukup banyak sehingga kebutuhan untuk pengangkutan ke tps membutuhkan biaya cukup besar. Padahal kecamatan Lembang sendiri belum memiliki tempat pembuatan akhir (TPA) sampah sehingga jika TPS yang berada di kabupaten lain ditutup tentu ini akan menjadi persoalan besar yang tentu saja menyangkut kebijakan pemerintah daerah.

Perilaku masyarakat yang tidak memahami bagaimana memilih sampah organik dan an organik menjadi permasalahan sampah ini menjadi permasalahan tersendiri. Padahal sampah organik apabila dikelola dengan baik dapat menjadi pupuk bagi tanaman . Apalagi daerah Cikole yang memiliki tanah yang subur sehingga pemanfaatan dari sampah organik seharusnya bisa dioptimalkan yang tidak mustahil akan bernilai ekonomis. Demikian juga sampah non-organik apabila dikelola dengan baik melalui proses pemilahan akan dapat menghasilkan uang atau menjadi tambahan penghasilan. Tentu saja perilaku ini tidak serta merta bisa diwujudkan, Peran masyarakat juga diperlukan agar masalah ini dapat diatasi secara maksimal, salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan melaksanakan program kampung hijau.

Makna dari kampung hijau bukan hanya sekedar sebuah kampung yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan untuk penghijauan. Namun, secara lebih mendalam kampung hijau merupakan sebuah tekad “kembali ke alam”, sehingga pengelolaan kampung mengarah pada aspek lingkungan. Indikator utama kampung hijau adalah mengelola komponen biotik dan abiotik, serta pengelolaan komponen sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Indikator ini lebih menonjolkan peran serta perangkat pemerintah desa atau kampung maupun masyarakat sebagai pilar penting dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup di masa mendatang.

Kampung hijau merupakan salah satu langkah antisipatif yang ditempuh pemerintah dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan maupun bencana alam (Pramudito,2014). Kampung hijau (*green village*) adalah gerakan penghijauan, penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kenyamanan dan pengolahan sampah secara mandiri. Program kampung hijau adalah program untuk melestarikan fungsi lingkungan sekitar agar tetap terjaga kelangsungannya. Untuk mewujudkan program kampung hijau ini dibutuhkan peran serta tiap elemen masyarakat dengan harapan hasil yang maksimal dari gerakan ini.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta (2007) menjelaskan bahwa kampung hijau merupakan sebuah kampung yang menerapkan indikator komponen lingkungan (biotik, abiotik), komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.

- a) Lingkungan (biotik, abiotik), meliputi: penanganan kebersihan lingkungan desa, konservasi sumber daya alam, pengelolaan fasilitas publik
- b) Sosial, meliputi: ruang dan aktivitas yang dapat digunakan secara komunal
- c) Ekonomi, meliputi: penyediaan sarana dan prasarana perekonomian
- d) Budaya, meliputi: tradisi/perilaku masyarakat (partisipasi)
- e) Kesehatan masyarakat, meliputi: peningkatan fasilitas yang mendukung kesehatan jasmani warga

Program kampung hijau tidak terlepas dari upaya penataan lingkungan secara berkelanjutan dan bukan semata-mata program perubahan perilaku khususnya terkait pengelolaan sampah. Lingkungan merupakan tempat atau space yang merupakan aspek utama dalam penataan ruang, sehingga perhatian terhadap lingkungan merupakan aspek yang paling utama. Isu lingkungan mengingatkan kita bahwa kebijakan pembangunan membutuhkan untuk memperhatikan penyediaan pada masa yang akan datang. Tanpa adanya inovasi atau strategi yang mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan, khususnya permukiman, dikhawatirkan kondisi lingkungan akan semakin menurun. Oleh karena itu, menanggapi masalah lingkungan secara berkelanjutan lebih penting daripada terus menerus menggalakkan strategi pembangunan yang berwawasan ekonomi dan politik (Dipakde et al., dalam Puspita 2013).

Desa Cikole Kecamatan Lembang, merupakan salah satu desa di daerah Lembang yang memiliki banyak potensi wisata. Dalam situasi pandemic beberapa wisata alam di daerah Cikole menjadi tujuan pariwisata turis domestic. Membuat lingkungan yang bersih dan nyaman tentunya akan meningkatkan pesona daerah Cikole untuk menarik wisatawan. Tentunya penataan lingkungan menjadi satu keniscayaan apalagi penataan lingkungan dengan tujuan menjadikan kampung hijau. Kondisi yang terjadi sebagaimana diungkapkan sebelumnya perilaku membuang sampah secara benar belum muncul. Masyarakat membuang sampah tanpa memperhatikan jenis sampah bahkan masih ternyata sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Tentunya dibutuhkan Gerakan perubahan perilaku masyarakat, dalam hal ini melalui program kampung hijau. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah untuk melakukan perubahan pada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat itu merupakan suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri (Sumaryo, 1991). Chambers (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat (Empowerment) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered participatory, empowering and sustainable*. Menurut Chamber, konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya

belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik”

Hadiyanti (2008) menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru) sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya dicirikan dengan relasi antarsubjek dengan subjek yang lain. Dengan kata lain, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subjek-objek menjadi subjek-subjek. Hal ini sejalan dengan pendapat Noor (2011) bahwa Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah “masyarakat tidak dijadikan obyek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri”.

Sementara Purwanti (2011) menjelaskan tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas. Dalam hal ini diperlukan adanya adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Mikkelsen, (2001) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri, dapat juga diartikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka Adanya partisipasi inilah yang akan menentukan bahwa pola relasi subyek-obyek berubah menjadi subyek-subyek yang terjadi dalam proses pemberdayaan ini.

Nuryasin (2011) menjelaskan prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri, antara lain:

a. *Penyadaran*

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya.

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

b. *Pelatihan*

Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan tertentu. Belajar dilakukan melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa *pengetahuan menganggarkan kekuatan*.

c. Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir.

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

d. Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata "kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan".

e. Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut

Pemberdayaan masyarakat mulai dikembangkan oleh Chambers pada tahun 1970 dengan dikembangkannya *rapid rural appraisal* (RRA). Pada perkembangannya, RRA banyak mendapat kritikan, salah satunya adalah pengumpulan dan analisis data dilakukan oleh pihak luar. Oleh karena itu, pada tahun 1980 dikembangkan *participatory rural appraisal* (PRA), yaitu pihak luar berperan sebagai fasilitator dan pelaksanaannya adalah masyarakat (Chambers, 1994). Melalui metode PRA dapat diperoleh data situasi dan kondisi wilayah yang komprehensif sebagai dasar perencanaan kegiatan spesifik lokal. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode PRA, dalam hal ini peneliti sebagai pihak luar yang sekaligus berperan sebagai fasilitator.

*Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu himpunan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk berbagi, mengembangkan, dan menganalisa pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, untuk perencanaan dan aksi (Chambers, 1994). PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan "orang dalam" yang terdiri dari semua stakeholders dengan difasilitasi oleh orang-luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang mengkurui. Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat di Kampung Anggrek sebagaimana paparan konseptual tentang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjadi warga Kampung Anggrek sebagai subyek, dalam hal ini sebagai perencana dan pelaksanaan program pengembangan Kampung Hijau. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

yang dilakukan menempatkan peneliti sebagai fasilitator dalam program ini termasuk dalam upaya mengembangkan potensi atau kemampuan, sikap dan perilaku warga Kampung Anggrek. Perubahan sikap dan perilaku bukanlah proses instan. Oleh karena itu fasilitator dalam program ini sekaligus berperan pendamping warga menuju terbentuk Kampung Hijau khususnya untuk membentuk perilaku dalam pengelolaan sampah yang tepat.

Mengacu pendapat Nuryasin (2011), pada awal-awal kegiatan, peran "Pendamping" akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya "Pendamping" harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat "Pendamping" meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri.

Program pemberdayaan ini diawali dengan memberikan pelatihan bagi 20 orang pengurus RW dan RT di Kampung Anggrek yang merupakan petugas inti yang akan mengkoordinir pengembangan kampung hijau. Dengan kata lain pelatihan ini merupakan TtT -Training for Trainer. Trainer inilah yang akan menjadi penggerak warga Kampung Anggrek dalam perilaku pengelolaan sampah dalam kerangka membentuk kampung hijau. Setiap pengurus yang masuk 20 ini akan ditugaskan mendampingi 20 KK dalam proses Pembentukan kampung hijau khususnya dalam membentuk perilaku membuang sampah yang tepat. Tim pengabdian kepada masyarakat menjadi pendamping tim pengurus RW yang bertugas sebagai Trainer bagi warga.

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan kajian untuk mendapatkan gambaran program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan potensi masyarakat, dalam hal ini warga kampung Anggrek untuk terlibat dalam program kampung hijau. Adapun kelompok sasaran kajian adalah tim inti RW yang akan bertugas menjadi koordinator sekaligus menjadi pendamping warga.

## **2. Metode**

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan membentuk perilaku masyarakat khususnya dalam mengelola sampah sehingga menjadikan lingkungan bersih dan sehat melalui program pemberdayaan masyarakat. Untuk itu dilakukan kajian untuk mendapatkan gambaran program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kampung hijau di Kampung Anggrek Cikole Lembang. Program pemberdayaan ini menggunakan rancangan *participatory action research (PAR)* yaitu tim pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai peneliti bekerja secara sistematis bersama partisipan dalam menggali dan menyelesaikan permasalahan (Koch & Kralik, 2006). Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kampung Anggrek RT 06 dan RT 07 RW 06 Desa Cikole Kabupaten Lembang dengan partisipan 20 orang pengurus RW yang dipilih ketua RW sebagai tim inti kampung hijau

Adapun Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi terhadap perilaku partisipan, yaitu tim inti program kampung hijau. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perilaku partisipan, selanjutnya dikaji berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep kampung hijau.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Profil Kampung Anggrek

1	Luas tanah	19.090 m <sup>2</sup>
2	Jumlah Kepala Keluarga	183
3	Jumlah Penduduk Dewasa	574 orang
4	Jumlah Penduduk Anak-Remaja	445 orang
5	Mata Pencaharian warga	1 orang
	a.PNS	9 orang
	b.pensiunan	5 orang
	c.pegawai Desa	1 orang
	d.pegawai . Swasta	9 orang
	e.pedagang wiraswasta	61 orang
	f.petani	6 orang
	g. buruh harian lepas	72 orang

Berdasarkan data table 1, dibandingkan mata pencaharian lain pekerjaan sebagai pedagang/ wiraswasta dan sebagai buruh harian lepas, merupakan 2 mata pencaharian paling banyak. Berdasarkan data pada pengurus RW, warga Kampung Anggrek ini banyak yang memilih bekerja/berdagang di lokasi wisata sekitar Cikole termasuk Tangkuban Perahu dan tempat wisata lain di sekitar Lembang. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan seyogyanya mampu menaikkan perekonomian warga dan program Kampung Hijau sendiri akan menjadi daya tarik tersendiri yang memiliki nilai wisata juga.

### b. Gambaran Perilaku Warga (Tim Inti RW)

Tim inti RW yang berjumlah 20 orang adalah warga kampung menerima sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah dalam rangka pembentukan kampung hijau. Mengacu prinsip dasar pemberdayaan masyarakat Nuryasin (2011), gambaran perilaku tim inti diantaranya;

#### 1) Penyadaran

Pemenuhan prinsip ini diperoleh melalui kegiatan sosialisasi kepada tim. Setelah mendapatkan sosialisasi tentang apa dan bagaimana kampung hijau, yang tidak bisa dilepaskan dari perilaku dalam mengelola sampah, khususnya sampah dari rumah. Apa yang selama ini dipandang sebagai aktivitas biasa, seperti mencampurkan semua sampah setelah mendapatkan sosialisasi, tim inti menyadari pentingnya perilaku pengelolaan sampah karena selama ini masalah sampah dipandang tidak ada masalah sepanjang kas RW bisa menutup pengambilan sampah dari rumah tangga.

Penyadaran yang terjadi, tim inti ini menjadi sadar pentingnya mengatasi masalah sampah dan keterampilan dalam mengelola sampah dan pembentukan kampung hijau. Tim inti juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.



Gambar 1. Sosialisasi kampung hijau



Gambar 2. Pelatihan pengelolaan sampah organik



Gambar 3. Pelatihan pembuatan lubang biopori

2) Pengorganisasian.

Tim inti yang dipimpin ketua RW . Masing-masing anggota tim bertugas mendampingi 9-10 Kepala Keluarga. Sistem ini akan diharapkan akan memudahkan dalam mengkoordinir, memonitoring dan mengontrol upaya pembentukan perilaku warga dalam mengelola sampah. Tim inti ini rutin melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikoordinir RW dan didampingi tim peneliti .

3) Pengembangan kekuatan

Prinsip ini tidak bisa dicapai tanpa melalui tiga prinsip sebelumnya, yaitu penyadaran, pelatihan dan pengorganisasian. Tanpa mendapatkan penyadaran, latihan atau organisasi, individu akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Pengembangan kekuatan ini diperlukan dalam rangka mempengaruhi orang lain dan tim inti ini bertugas sebagai tim yang bisa mempengaruhi warga untuk terlibat dalam proses pembentukan kampung hijau khususnya perilaku pengelolaan sampah. Tim inti ini menjadi *agent of change* bagi warga lain dalam pembentukan perilaku baru warga yang dibutuhkan dalam program ini.



Gambar 4. Tim inti mengajarkan kepada warga cara membuat biopori

#### 4) Membangun Dinamika

Prinsip ini dimanifestasikan dengan kemampuan masyarakat untuk merencanakan program, memutuskan dan melaksanakan program-programnya bukan oleh fasilitator atau pendamping tim. Pada program ini tim inti yang dipimpin Ketua RW mampu membangun dinamika terutama pada saat pembuatan biopori di lingkungan kampung Anggrek sebagai bagian tidak terpisahkan dalam membangun perilaku dalam pengelolaan sampah

Lima prinsip dasar pemberdayaan masyarakat menurut Nuryasin (2011) pada dasarnya merupakan tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Prinsip penyadaran merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan adanya proses kognitif pada masyarakat sasaran. Melalui perubahan cara pandang ataupun munculnya insight mendorong munculnya perubahan perilaku. Adapun prinsip pelatihan pada dasarnya merupakan intervensi dari pihak luar, fasilitator program pemberdayaan ataupun pihak lain.

Berdasarkan paparan terkait implementasi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat khususnya pada perilaku tim inti, tampak bahwa telah dicapai meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kemandirian pada tim inti sehingga peran peneliti sebagai fasilitator semakin berkurang. Di bawah kepemimpinan Ketua RW diawali gagasan dari fasilitator saat ini meski program pengembangan kampung hijau masih berjalan, warga masyarakat khususnya tim inti sudah menjadikan program ini sebagai program warga sendiri.

Kemandirian warga juga tampak saat warga mengajukan pendanaan program kepada pemerintah desa Cikole. Meski tidak mendapat bantuan pihak desa, kepengurusan RW melakukan pendanaan sendiri untuk berjalannya program pembentukan kampung hijau ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah

menjadi subyek dalam program pembangunan kampung hijau. Sebuah perubahan perilaku yang tentunya tidak terpisah dari adanya perubahan secara pengetahuan dan pemahaman serta menunjukkan adanya motivasi untuk terlibat dalam program ini. Sebagaimana pendapat Noor (2011) bahwa “masyarakat tidak dijadikan obyek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri”.

Di sisi lain mengacu pendapat Hadiyanti (2008) bahwa proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin manifes dengan munculnya inisiatif-inisiatif tim terkait program pengembangan kampung hijau. Selain munculnya program swadaya warga dalam pengadaan barang keperluan penyusunan kampung hijau yang merupakan sumber daya warga, pemanfaatan sumber daya juga muncul dengan pemberdayaan warga yang memiliki keahlian yang berhubungan dengan program. Salah satu anggota tim inti yang memiliki keahlian dalam pengelolaan tanaman hidroponik maupun tanaman organik ditunjuk untuk mengkoordinir penataan tanaman dengan media dari botol bekas sebagai bagian tidak terpisahkan dari perilaku pengelolaan sampah .

Bagaimana perilaku warga lain sebagai sasaran pendampingan tim inti RW dalam program kampung hijau? Sejauh ini, warga di luar tim inti sudah menunjukkan dukungan terhadap program pengembangan kampung hijau yang sampai saat ini masih berjalan. Sosialisasi kepada warga diantaranya melalui kegiatan pengajian dan kegiatan yang dipimpin RT. Dengan system masing-masing anggota tim inti mendampingi sejumlah KK hal ini memudahkan upaya sosialisasi .

Dukungan warga juga ditunjukkan dengan kesiapan untuk terlibat dalam program kampung hijau antara membantu mengumpulkan botol bekas dan mewarnainya untuk dijadikan media tanaman/vertical garden. Sebagian warga menyiapkan lahan/dinding luar atau pagar untuk dijadikan area vertical garden dari botol-botol bekas. Selain menunjukkan dukungannya, hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang, dalam hal ini terkait pemanfaatan botol bekas, yang sebelumnya dijadikan sebagai sampah. Meskipun perubahan perilaku ataupun cara pandang terkait sampah, mengingat program ini masih berjalan, melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menyentuh semua warga tidak terkecuali anak-anak.



### **3. Hasil dan Pembahasan**

Mengacu hasil analisis data observasi kepadatim inti RW terkait pemberdayaan masyarakat dalam program kampung hijau dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat, diperoleh simpulan:

- 1) Pemberdayaan masyarakat diawali melalui proses penyadaran yang merupakan perubahan pada cara pandang/aspek kognitif sebagai dasar perubahan perilaku
- 2) Pemberdayaan masyarakat ditunjukkan dengan adanya peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kemandirian masyarakat.
- 3) Melalui program pemberdayaan masyarakat, warga menjadi subyek dalam proses pembangunan lingkungan tempat tinggal, dalam program ini adalah pembentukan kampung hijau

Rekomendasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu dilakukan monitoring berkelanjutan atas perilaku masyarakat agar perubahan yang dihasilkan bisa menjadi perilaku yang menetap. Selain itu perlu dilakukan kerjasama dengan beberapa pihak/dinas dalam mengembangkan kampung hijau yang berpotensi menjadi kampung wisata .

### **Acknowledgement**

Ucapan terimakasih penulis kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Studi Psikologi, Kepala Desa Cikole dan Ketua RW06 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat serta seluruh pihak terkait yang membantu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terlaksana dengan sumber dana RKAT Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021

### **Daftar Pustaka**

- Chambers, Robert. (1994). "The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal" dalam *World Development*, 22 (7): 953–969.
- Hadiyanti, P. (2008) . Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan* - Vol. 17 Th. IX April
- Koch T. ,Kralik D. (2006). *Participatory action research in health care*. Bristish: Blackwell publishing
- Mikkelsen B. (2001). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Noor, M (2011) Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2 Hal 87 -99
- Nuryasin (2011). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa* melalui <https://grobogan.go.id/index.php/info/artikel/579-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-desa>
- Pedoman Penilaian Kampung Hijau.(2007). Yogyakarta: Bdan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pramudito,S (2014) . Kampung Hijau: Studi Perilaku Warga di Kampung Gambiran Yogyakarta dalam *Proceding Seminar Nasional: Konsep dan Implementasi Infrastrukru-Bangunan-Konstruksi "Hijau" Mewujudkan Kota Hijau*.hal 12-19.
- Pubantara, A., Mujiyanto (2019). *Modul KKN Tematik Desa Membangun*.

- Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Purwanti, PAP. (2011). *Penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat*. Tersedia pada: [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat.pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/penanggulangan_kemiskinan_berbasis_masyarakat.pdf)
- Puspita, A.A (2013). Analisis Upaya Masyarakat dalam Mewujudkan Kampung Hijau (Studi Kasus : Kelurahan Gayamsari, Kota Semarang ). Skripsi. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/19514724.pdf>
- Sumaryo. (1991). *Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam pemberdayaan masyarakat*. Disampaikan dalam pelatihan pengorganisasian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 26 November 2005